



PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA LUBUKLINGGAU

M. Danang Wicaksono¹, Hartawan², Agus Tiansah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas
Email: mdanangwijaksono11@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to determine the role of the department of the social services in tackling social welfare problems towards vagrant children at the city of Lubuklinggau south Sumatera province. A qualitative method by descriptive approach was used in this research. The data was collected by the implementation of observation, interview, and collected documentation. The data was analyzed along with reduction, display, and verification. The results of the research showed that the department of the social service already carried out its role in tackling social welfare. It can be seen from the indicators of primary duty, service and information granted, and conducted consultation. The other results that the role of social service department can be seen due to the empowerment in carrying out the control of vagrant children through workshop. A part of the facilities is needed to complete in regard with the limited of infrastructure, limited signed cooperation and budgeting allocation.

Keywords : Role, Social Service, Vagrant Children

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis dan mendalam tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, Khususnya pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan dan Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisa data dalam penelitian ini melalui pemilihan data, pengurangan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau terhadap Anak Jalanan, sudah terlaksana dapat dilihat dengan indikator yaitu, Pertama Peranan Pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan di dalam memberikan pelayanan, informasi dan konsultasi khususnya kepada Anak Jalanan. Kedua Peranan Pada Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan di dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan sudah dilakukan. Tetapi di dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalan dalam memberikan pelatihan, pendidikan dan keterampilan ini belum terlaksana. Dikarenakan terkendala sarana dan prasarana, tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait dan alokasi anggaran.

Kata Kunci : Peranan, Dinas Sosial, Anak Jalanan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan social.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 adalah "sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat". Tujuan pembangunan nasional serta pasal pembangunan nasional UUD 1945 tersebut akan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Saat ini permasalahan yang cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, yang dimana hampir setiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan.

7	Lanjut Usia Terlantar
8	Penyandang Disabilitas
9	Tuna Susila
10	Gelandangan
11	Pengemis
12	Pemulung
13	Kelompok Minoritas
14	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)
15	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA
17	Korban Trafficking
18	Korban Tindak Kekerasan
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBs)
20	Korban Bencana Alam
21	Korban Bencana Sosial
22	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
23	Fakir Miskin
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
25	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
26	Komunitas Adat Terpencil

*Sumber : Data Kementerian Sosial
Republik Indonesia 2012*

Tabel 1.1 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Jenis PMKS
1	Anak Balita Terlantar
2	Anak Terlantar
3	Anak Berhadapan dengan Hukum
4	Anak Jalanan
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dinas Sosial merupakan sebuah lembaga yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah serta menanggulangi angka kemiskinan, melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan hasil observasi bahwa potret anak jalanan di Kota Lubuklinggau sebagai dampak dari kemiskinan struktural dan kultural tentu harus diubah. Dan tentu usaha untuk mengubah itu tidak saja berhenti pada penertiban-penertiban Satpol PP di segala penjuru lampu lalu lintas dan pembinaan dari Dinas Sosial. Pada ranah kebijakan, pemerintah berkewajiban membangun kebijakan pemerataan ekonomi, logika pertumbuhan ekonomi jangan sampai melupakan usaha untuk melakukan distribusi ekonomi yang merata. Khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tabel 1.2 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

o	Jenis PMKS	Jumlah PMKS
	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	15
	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Fungsi Sosial (AMPP)	-
	Anak Jalanan	21
	Anak Balita	-
	Penyandang Disabilitas Terlantar	-

8	Penyandang Disabilitas Terlantar	Non Terlantar
-	Tuna Susila	
-	Korban Perdagangan Orang	
1	Korban Kekerasan	Tindak
25	Lanjut Terlantar	Usia
-	Lanjut Terlantar Non Terlantar	Usia
-	Korban Penyalagunaan NAPZA	

Sumber : Dinas Sosial Kota Lubuklinggau 2021

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, Pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, sekarang tercatat ada 24 jenis data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibagi menjadi beberapa bidang yaitu, bidang bantuan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin.

Saat ini Kota Lubuklinggau masih banyak memiliki masalah sosial dari tahun ke tahun, dapat dilihat dari jumlah data penduduk miskin di Kota Lubuklinggau pada tahun 2019 mencapai 29.980 Jiwa, pada tahun 2020 mencapai 29.800 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2021 mencapai 31.610 Jiwa. Dengan bertambah banyaknya penduduk miskin di Kota Lubuklinggau sehingga banyak menimbulkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di setiap tahunnya, seperti yang diketahui masyarakat yang memiliki masalah sosial, salah satu contohnya menjadi Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dll, dimana permasalahan sosial tersebut termasuk dalam jenis PMKS pada bidang rehabilitasi sosial.

Tabel 1.3 Anak Jalanan

o	Jumlah Anak Jalanan	Tahun
	15	2017
	37	2018
	-	2019
	21	2020
	21	2021

Sumber: Dinas Sosial Kota Lubuklinggau 2022

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, bahwa seperti yang diketahui saat ini, masih banyak Anak Jalanan yang ditemui ditempat umum, seperti di Lampu Merah RCA, Pasar ,Taman Kurma, dan tempat umum lainnya, sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat umum, dan membuat pandangan merdeka akan merasa terganggu kesejahteraannya, permasalahan ini tentunya masih harus diatasi karena mengingat Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 16 Tahun 2019 bahwa masalah sosial ini harus diatasi oleh pemerintah. Adapun Perda No.15 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan , Gelandangan dan Pengemis.

Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.

Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2014, h:31) Rumusan Masalah adalah Pertanyaan Penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah yang

telah di paparkan sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk mencari informasi bagaimana Peran Dinas Sosial dalam melakukan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Anak Jalanan Di Kota Lubuklinggau?

Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai PMKS (Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial), maka agar pembahasan lebih terfokus penulis mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam penelitian ini. Secara lebih sepesifik penulis hanya membatasi pada masalah Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pemberdayaan pada Anak Jalanan Di Kota Lubuklinggau.

Tujuan

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk Mengetahui sejauh mana Peran dinas sosial Kota Lubuklinggau dalam melakukan rehabilitasi dan pembinaan pada permasalahan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khusunya Anak Jalanan Di Kota Lubuklinggau.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang

menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.

Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dinas Sosial

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui dalam hal ini Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Selain itu dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung Jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar". Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Definisi Konseptual

Definisi Konseptual seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:208) adalah "suatu istilah yang menggunakan abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial tentang situasi sosial, atau abstraksi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/ gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Metode penelitian kualitatif ini sering

disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang bersifat alamiah (natural setting), bisa sebut juga penelitian ini sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode uni lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, Sugiyono (214,h: 1).

Adapun metode yang peneliti gunakan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pengaruh bersama pola-pola nilai yang di hadapi. Jadi metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan sistem pengamatan, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. Penelitian yang peneliti gunakan ini diharapkan dapat memberikan data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan serta diharapkan dapat memahami fenomena dan gejala sosial, diharapkan hasil penelitian ini berbentuk rangkaian kata maupun uraian singkat mengenai Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Anak Jalanan Di Kota Lubuklinggau.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, (Sugiyono 2019, h:194) Data primer adalah data yang diperoleh oleh sumber penelitian

dalam hal ini data primer merupakan hasil wawancara dan informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari tempat atau lokasi penelitian, informan dan orang yang di wawancarai.

2. Sumber Sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara) kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya, (Sugiyono 2019, h:194)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Sugiyono (2014, h:62). Dari penjelasan diatas maka metode yang akan digunakan peneliti adalah :

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2019. h:203) mengemukakan bahwa, "observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi agar dapat melihat bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau.

2. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2019, h:195) mengemukakan bahwa “anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview (wawancara)”.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik Dokumentasi yang digunakan yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian misalnya foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, buku, gambar, dan file yang mendukung penelitian.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, h:288-289) “Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel meliputi, yaitu 1) Sampling sistematis, 2) Sampling kouta, 3) Sampling aksidental, 4) purposive sampling, 5) Sampling jenuh, 6) Snowball sampling”. Dari keenam teknik sampling di atas peneliti tertarik menggunakan purposive sampling, menurut Sugiyono (2019, h:289)

Tabel 3.2 Informan Penelitian

o	Jen is Informan	Jabatan
	Inf orman Kunci	ial Kota Lubuklinggau
	Inf orman Pendukung	1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Lubuklinggau 2. Pendamping Rehabilitasi Sosial 3. Pengurus Rumah Singgah 4. Kepala Seksi Ketertiban Umum (Sat Pol PP Kota

	Lubuklinggau)
5.	Anak Jalanan

Aspek-Aspek Penelitian

Pengertian Variabel Menurut Sugiyono (2019, h:67) yaitu “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Tabel 3.3 Aspek Penelitian

Variabel	Indikator	Sub-sub Indikator
Peranan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau	Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan	a. Pelaksanaan Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) b. Pengelolaan Informasi Dalam Memberikan Himbauan Peraturan Daerah Kepada Masyarakat. c. Pelayanan Konsultasi Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan	a. Penertiban Terhadap Anak Jalanan b. Pembinaan Terhadap Anak Jalanan

Teknik Analisis Data

Menurut Spardley (dalam Sugiyono 2014, h:89) “Analisis dalam penelitian apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengajuan secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah untuk mencari pola". Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpul data dengan alur tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014 h:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak akan ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menerangkan bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat

beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya pada anak jalanan, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai yang dijelaskan tabel 5.1, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan Informan	Keterangan
1	Kahlan S.Sos., M.Si	KH	Kepala Dinas Sosial	Kunci
2	Fahmi Zuhriansyah S.H	FZ	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Pendukung
3	Rizky Saputra , S.Sos., M.Si	RS	Pendamping Sosial 1	Pendukung
4	Ayub Saputra, S.Sos	AS	Pendamping Sosial 2	Pendukung
5	Hasnawi Paku Alam	HPA	Pengurus Rumah Singgah	Pendukung
6	A.Koba Ibrahim S.Sos., M.Ap	A.KI	Kasi Tibum Sat-POL PP	Pendukung
7	Hengky	HY	Anak Jalanan	Pendukung
8	Febri	FB	Anak Jalanan	Pendukung
9	Desta	DS	Anak Jalanan	Pendukung
10	Defan	DF	Anak Jalanan	Pendukung
11	Adit	AT	Anak Jalanan	Pendukung

12	Clara	CL	Anak Jalanan	Pendukung
13	Evi	EV	Anak Jalanan	Pendukung

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022

Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan merupakan salah satu fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Lubuklinggau untuk mencapai tujuan agar tercapainya suatu Peranan yang ada di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau pada Bidang Rehabilitasi Sosial. Fungsi pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang, salah satunya pada bidang rehabilitasi sosial ini.

Pelaksanaan Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurut hasil observasi peneliti bahwa dalam pelaksanaan pelayanan ini merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, peneliti juga menemukan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini akan menentukan tercapainya suatu Peranan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap Anak Jalanan, pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pengelolaan Informasi Dalam Memberikan Himbauan Peraturan Daerah Kepada Masyarakat.

Menurut hasil observasi peneliti, bahwa pengelolaan informasi merupakan proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau pada bidang rehabilitasi sosial dalam memberikan

informasi berupa himbauan kepada masyarakat dan anak jalanan, gelandangan, serta pengemis, kemudian peneliti menemukan bahwa Pengelolaan Informasi kepada masyarakat yang akan menentukan tercapainya suatu Peranan Dinas Sosial dalam Pengelolaan Informasi Memberikan Himbauan Peraturan Daerah Kepada Masyarakat.

Pelayanan Konsultasi Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Menurut hasil observasi pelayanan konsultasi merupakan upaya Dinas Sosial Khususnya Bidang Rehabilitasi sosial dalam memberikan layanan konsultasi/konseling terhadap klien yaitu salah satunya terhadap anak jalanan, peneliti menemukan bahwa Pelayanan Konsultasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ini yang akan menentukan suatu peranan Dinas Sosial ini dalam memberikan suatu pelayanan konsultasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam hal ini anak jalanan.

Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan salah satu fungsi sekunder yang harus dijalankan pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Lubuklinggau untuk mencapai tujuan agar tercapainya suatu Peranan yang ada di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau pada Bidang Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan berarti upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi untuk mengembangkannya.

Penertiban Terhadap Anak Jalanan

Menurut hasil observasi peneliti penertiban merupakan tindakan dalam rangka untuk menumbuhkan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, kemudian peneliti menemukan bahwa Penertiban Terhadap Anak Jalanan merupakan tugas SAT POL PP Kota Lubuklinggau dalam menegakan peraturan daerah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan serta mendukung untuk menentukan tercapainya Suatu peranan Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya pada anak jalanan di Kota Lubuklinggau.

Pembinaan Terhadap Anak Jalanan

Menurut hasil observasi peneliti pembinaan anak jalanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melalui yayasan rumah singgah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kreativitas dan keterampilan anak jalanan agar tercapainya kesejahteraan anak jalanan dengan harapan agar mereka tidak kembali ke jalanan, kemudian peneliti menemukan bahwa Pembinaan Terhadap Anak Jalanan ini akan menentukan tercapainya suatu peranan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan khususnya pada anak jalanan di Kota Lubuklinggau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Peranan Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam hal ini terhadap anak jalanan di Kota Lubuklinggau sudah terlaksana,

dapat dilihat dengan indikator yaitu, Pertama Peranan Pada Fungsi Primer Atau Fungsi Pelayanan di dalam memberikan pelayanan, informasi dan konsultasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Lubuklinggau khususnya kepada Anak Jalanan. Kedua Peranan Pada Fungsi Sekunder Atau Fungsi Pemberdayaan di dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan sudah dilakukan. Tetapi di dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dalam memberikan pelatihan, pendidikan dan keterampilan ini belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan terkendala sarana dan prasarana, tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait dan alokasi anggaran. Dan terlaksana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dan Perda No 15 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Geladangan dan Pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Anggara Sahya 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia.

Cahyono Ma'ruf 2018. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- Lubuklinggau, B. P. 2018. Kota Lubuklinggau Dalam Angka. Lubuklinggau: BPS Kota Lubuklinggau.
- Lubuklinggau, B. P. 2019. Kota Lubuklinggau Dalam Angka. Lubuklinggau: BPS Kota Lubuklinggau.
- Soekanto, S. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihah, R. 2019. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syani, A. 2012. Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan. Jakarta: Budi Aksara.
- Rawas, U. M. 2021. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas. Kota Lubuklinggau: Universitas Musi Rawas.
- Lubuklinggau,D,S. 2018. Rencana Strategis Dinas Sosial Lubuklinggau Kota: Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permensos Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Permensos Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
- Perda Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
- Perda Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Sumber Internet

<https://intelresos.kemensos.go.id>

<https://kemensos.go.id>

<https://lubuklinggaukota.bps.go.id>

Sumber Jurnal

Caesar, M. R., LISTANIA, T., & Undang, G. 2020. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Sumber Dokumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL. NEO
POLITEA, 1(2), 1-16.

Ginting, E. A. B. 2015. Eksistensi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai dalam Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Binjai. *PERSPEKTIF*, 4(1).

Latifah, S., Meigawati, D., & Mulyadi, A. 2021. Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 10(1), 75-84.

Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. 2021. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *GOVERNANCE*, 1(2).